

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU INDONESIA PINTAR (KIP)
SEBAGAI UPAYA PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN DI KELURAHAN
GUNUNGSARI KECAMATAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA**

Elizabeth Olivia Letek Goran

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
oliviagoran123@gmail.com

Supri Hartono

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
suprihartono@untag-sby.ac.id

M. Kendry Widyanto

Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
kenronggo@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Indonesia Smart Card Program (Kartu Indonesia Pintar/KIP) in Gunungsari Village using George C. Edward III's policy implementation theory. This theory emphasizes four main variables that determine the success of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observation, and documentation. The informants in this study consist of the Welfare Service Staff of Gunungsari Village, Administrative Staff of SDN Gunungsari I, and parents of students who are beneficiaries of the KIP Program. The results of the study show that the implementation of the KIP Program in Gunungsari Village has been running quite well, but it has not yet been fully successful. In terms of communication, the program implementation can be considered successful because information regarding the KIP Program has been delivered through various channels, such as schools, the village office, neighborhood units (RT/RW), social media, and direct information services. In terms of disposition, the implementers demonstrate strong commitment and responsibility in assisting the community throughout the data collection, verification, and distribution processes. However, in terms of resources, there are still limitations in the number of staff handling program administration, which results in less optimal service delivery and data updating processes. In addition, in terms of bureaucratic structure, there are still obstacles related to verification and validation processes involving multiple institutions, which require a relatively long time for beneficiary determination and fund distribution. Overall, the

implementation of the Indonesia Smart Card Program (KIP) in Gunungsari Village has been running fairly well as it helps students from low-income families access educational assistance. However, improvements are still needed in human resources and simplification of coordination and data verification processes to ensure that the program can be implemented more effectively, efficiently, and accurately targeted.

Keywords: *policy implementation, Indonesia Smart Card Program (KIP), George C. Edward III, Educational Assistance, Access to Education, Gunungsari Village.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari dengan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III. Teori ini menekankan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini meliputi Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari, Staf Tata Usaha SDN Gunungsari I, serta orang tua siswa penerima manfaat Program KIP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program KIP di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik, namun belum sepenuhnya berhasil. Pada aspek komunikasi, pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil karena informasi mengenai Program KIP telah disampaikan melalui berbagai saluran, seperti sekolah, kelurahan, RT/RW, media sosial, dan pelayanan informasi secara langsung. Pada aspek disposisi, para pelaksana menunjukkan komitmen dan tanggung jawab yang baik dalam membantu masyarakat selama proses pendataan, verifikasi, hingga penyaluran bantuan. Namun, pada aspek sumber daya masih ditemukan keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi program sehingga proses pelayanan dan pembaruan data belum berjalan secara optimal. Selain itu, pada aspek struktur birokrasi masih terdapat kendala berupa proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi sehingga membutuhkan waktu yang relatif lama dalam proses penetapan dan penyaluran bantuan. Secara keseluruhan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari telah berjalan cukup baik karena mampu membantu siswa dari keluarga kurang mampu dalam memperoleh bantuan pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan sumber daya pelaksana serta penyederhanaan proses koordinasi dan verifikasi data agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Program (KIP), George C. Edward III, Bantuan Pendidikan, Akses Pendidikan, Kelurahan Gunungsari.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan yang

diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup dan berpartisipasi dalam pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia telah menjamin hak pendidikan bagi seluruh warga negara melalui berbagai kebijakan dan program pendidikan. Salah satu bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu adalah melalui Program Kartu Indonesia Pintar (KIP). Program ini bertujuan untuk membantu peserta didik dari keluarga kurang mampu agar tetap dapat mengakses pendidikan dan terhindar dari risiko putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi.

Meskipun berbagai program bantuan pendidikan telah dilaksanakan, masih terdapat sejumlah permasalahan yang menghambat pemerataan akses pendidikan. Salah satu permasalahan yang sering ditemukan adalah keterbatasan ekonomi keluarga yang menyebabkan siswa kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan. Selain itu, masih terdapat siswa yang berisiko putus sekolah karena ketidakmampuan orang tua dalam membiayai kebutuhan pendidikan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa bantuan pendidikan masih sangat dibutuhkan sebagai upaya untuk mendukung keberlangsungan pendidikan peserta didik, khususnya bagi keluarga yang berada dalam kondisi ekonomi kurang mampu.

Sebagai salah satu program bantuan pendidikan nasional, Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) merupakan bentuk intervensi pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kesempatan memperoleh pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu. Melalui program ini, pemerintah memberikan bantuan dana pendidikan yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan sekolah seperti pembelian perlengkapan belajar, seragam, alat tulis, serta kebutuhan pendidikan lainnya. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat terus melanjutkan pendidikan tanpa terkendala oleh masalah ekonomi keluarga.

Dalam pelaksanaannya, Program KIP melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, Dinas Pendidikan, sekolah, kelurahan, hingga lembaga perbankan sebagai penyalur bantuan. Keterlibatan berbagai instansi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan Program KIP sangat bergantung pada koordinasi, komunikasi, serta dukungan sumber daya yang memadai. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti ketidaksesuaian data penerima manfaat, keterlambatan proses verifikasi dan validasi data, keterbatasan sumber daya pelaksana, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai prosedur pengajuan dan pencairan bantuan. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Kelurahan Gunungsari merupakan salah satu wilayah di Kota Surabaya yang melaksanakan Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi siswa yang memenuhi kriteria penerima bantuan. Dalam pelaksanaannya, pihak kelurahan dan sekolah memiliki peran penting dalam membantu proses pendataan, verifikasi, serta penyampaian informasi kepada masyarakat. Namun, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, masih terdapat berbagai kendala yang memengaruhi pelaksanaan program, seperti keterbatasan jumlah petugas, proses administrasi yang cukup panjang, serta permasalahan data penerima manfaat. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Program Kartu

Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari sehingga dapat diketahui sejauh mana program telah dilaksanakan serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan pelaksanaannya.

B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif untuk menganalisis implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari. Metode kualitatif dipilih karena mampu memberikan pemahaman secara mendalam mengenai proses pelaksanaan program, berbagai kendala yang dihadapi, serta persepsi para pelaksana dan penerima manfaat terhadap Program KIP. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis kondisi yang terjadi di lapangan sehingga peneliti dapat memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi Program KIP.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang menekankan empat variabel utama yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teori ini digunakan sebagai pisau analisis untuk mengkaji bagaimana proses pelaksanaan Program KIP di Kelurahan Gunungsari, mulai dari penyampaian informasi kepada masyarakat, ketersediaan sumber daya pendukung, sikap pelaksana dalam menjalankan program, hingga koordinasi dan pembagian tugas antarinstansi yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan Program KIP, yaitu Staf Pelayanan Kesejahteraan Kelurahan Gunungsari, Staf Tata Usaha SDN Gunungsari I, serta orang tua siswa penerima manfaat Program KIP. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai dokumen pendukung seperti Peraturan Wali Kota Surabaya, petunjuk teknis Program KIP, laporan pelaksanaan program, arsip administrasi, serta literatur yang relevan dengan implementasi kebijakan publik dan bantuan pendidikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan dan dokumen yang berkaitan dengan Program KIP. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang mendalam mengenai implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari berdasarkan variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari menunjukkan bahwa program bantuan pendidikan telah berjalan cukup baik dalam mendukung akses pendidikan bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu. Pelaksanaan Program KIP dilakukan melalui kerja sama antara berbagai pihak, yaitu pemerintah pusat, Dinas Pendidikan, pihak kelurahan, sekolah, dan bank

penyalur yang memiliki peran masing-masing dalam proses pendataan, verifikasi, penetapan penerima, hingga pencairan bantuan. Dalam pelaksanaannya, pihak sekolah dan kelurahan tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi, tetapi juga memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait persyaratan, kelengkapan dokumen, serta prosedur pengajuan bantuan. Berbagai bentuk sosialisasi juga dilakukan melalui sekolah, RT/RW, media sosial, maupun pelayanan secara langsung sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Program KIP. Kehadiran program ini memberikan dukungan nyata bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk tetap memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan tanpa terkendala masalah ekonomi.

Implementasi Program KIP juga memberikan manfaat yang cukup besar bagi penerima bantuan. Bantuan pendidikan yang diterima dapat digunakan untuk menunjang kebutuhan sekolah seperti pembelian perlengkapan belajar, seragam, alat tulis, biaya transportasi, maupun kebutuhan pendidikan lainnya. Bagi sebagian keluarga penerima manfaat, bantuan tersebut mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga yang berkaitan dengan biaya pendidikan anak. Selain itu, adanya pendampingan dari pihak sekolah dan kelurahan membantu masyarakat yang mengalami kesulitan dalam proses administrasi maupun penggunaan sistem yang digunakan dalam Program KIP. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KIP tidak hanya berfokus pada penyaluran bantuan dana, tetapi juga memberikan pelayanan dan pendampingan kepada masyarakat agar bantuan dapat diterima sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sisi tujuan program, Program KIP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan pemerataan akses pendidikan dan mencegah terjadinya putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi. Program ini ditujukan untuk memastikan bahwa siswa dari keluarga kurang mampu tetap dapat melanjutkan pendidikan dan memperoleh hak pendidikan yang layak. Melalui bantuan yang diberikan secara berkelanjutan, Program KIP diharapkan dapat meningkatkan partisipasi pendidikan, mengurangi kesenjangan akses pendidikan, serta mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Dengan demikian, Program KIP tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa bantuan biaya pendidikan, tetapi juga memiliki dampak jangka panjang dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan.

Meskipun implementasi Program KIP telah memberikan manfaat yang cukup besar bagi masyarakat, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan program. Dari aspek sumber daya, masih terdapat keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi Program KIP baik di tingkat sekolah maupun kelurahan, sementara jumlah masyarakat yang membutuhkan pelayanan cukup banyak. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksana harus menangani berbagai tugas secara bersamaan sehingga proses pelayanan dan pembaruan data belum dapat dilakukan secara maksimal. Selain itu, masih ditemukan kendala teknis seperti data siswa yang belum sinkron, NISN yang tidak valid, serta gangguan sistem yang menghambat proses penginputan maupun pengecekan data penerima bantuan. Dari aspek struktur birokrasi, proses verifikasi dan validasi data yang melibatkan berbagai instansi memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan sesuai prosedur yang

berlaku. Akibatnya, proses penetapan dan pencairan bantuan terkadang mengalami keterlambatan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarinstansi, penyederhanaan proses administrasi, serta pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar pelaksanaan Program KIP dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan program.

D. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan lapangan, implementasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Kelurahan Gunungsari menunjukkan capaian yang cukup baik dalam membantu siswa dari keluarga kurang mampu memperoleh akses pendidikan. Program ini telah memberikan manfaat bagi penerima bantuan melalui pemberian dukungan biaya pendidikan sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan sekolah siswa. Selain itu, pihak sekolah dan kelurahan juga berupaya memberikan informasi, pendampingan, serta pelayanan administrasi kepada masyarakat dalam proses pengajuan, pendataan, dan pencairan bantuan KIP.

Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi program, seperti keterbatasan jumlah petugas yang menangani administrasi KIP, tingginya beban kerja pelaksana, kendala pada proses verifikasi dan validasi data, serta lamanya koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam penetapan penerima bantuan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antarinstansi, serta pembaruan data penerima manfaat secara berkala agar pelaksanaan Program KIP dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan program.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2017). Kebijakan pendidikan menengah dalam perspektif governance di indonesia. Universitas Brawijaya Press.
- Dahlan, M., & Anggoro, S. A. (2021). Hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas di sektor publik: antara model disabilitas sosial dan medis. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(1), 1-48.
- Handayani, P. (2021). Analisis Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Perspektif Good Governance di Kota Surakarta. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Hartono, B. (2021). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Mendukung Wajib Belajar 12 Tahun di Kabupaten Klaten. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan*.
- Herlinawati, H., Indriyanto, B., Fajarini, C. D., & Sudiyono, S. (2018). Kajian implementasi program Indonesia pintar.
- Indriaty, D., Astriani, D., Sabrifha, E., & Aqilla, L. (2025). Strategi Kebijakan Pendidikan dalam Menghadapi Ketimpangan Sosial dan Budaya. *PEMA*, 5(2), 551-565.
- Indriyanto, B. (2012). Dimensi Pembangunan Karakter dan Strategi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 18(1), 21-33.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar*. Jakarta: Kemendikbud.
- Mangkuwinata, S. M. I., Kurniady, D. A., Tjutju Yuniarsih, S. E., & Abubakar, M. P. (2025). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Strategi Dan Model Dalam Meningkatkan Mutu*. Indonesia Emas Group.
- Nugraha, M. A., Amanda, V. T., Zidane, R. A., & Karwati, L. (2024). Peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan program pendidikan kecakapan hidup. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(4), 239-251.
- Nurjannah, S. (2020). Evaluasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Partisipasi Sekolah Siswa Miskin di Kota Malang. *Jurnal Evaluasi Kebijakan Pendidikan*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk Membangun Keluarga Produktif*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Prasetyo, D. (2022). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Gresik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1), 193-204.
- Sartika, D. (2021). Analisis Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Perspektif Kebijakan Publik di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Administrasi*.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Setiawan, A. (2020). Evaluasi Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Mendukung Pemerataan Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Penelitian Pendidikan*.
- Setyaningsih, R. (2019). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Anak Kurang Mampu di Kabupaten Bantul. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.
- Ulumudin, A., Nurbudiwati, N., Karmila, M., & Amrilah, R. R. (2020). Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2), 1-8.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488.
- Wahyuni, R. (2021). Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) dalam Meningkatkan Akses Pendidikan Dasar di Kabupaten Bogor. *Jurnal Administrasi Pendidikan*.